

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN (BANPANG)
DI DESA KUSAMBI HULU KECAMATAN LAMPIHONG
KABUPATEN BALANGAN**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Penyusunan Skripsi
Program Studi Administrasi Publik



OLEH
RAHMIYATI THAYYIBAH
NPM: 2022548

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

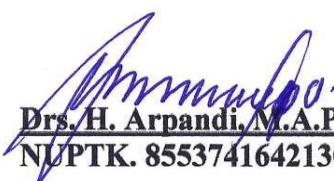
NAMA : **RAHMIYATI THAYYIBAH**
NPM : 2022548
PROGRAM STUDI : Administrasi Publik
JUDUL SKRIPSI : **EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN
PANGAN (BANPANG) DI DESA KUSAMBI
HULU KECAMATAN LAMPIHONG
KABUPATEN BALANGAN**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Drs. H. Arpandi, M.A.P.
NUPTK. 8553741642130083


Erwin Maulana, S.AP., M.A.P.
NUPTK. 2556769670130283

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A.
NIK. 199211004 201509 021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Program Bantuan Pangan (Banpang) Di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan**”.

Terwujudnya proposal skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal skripsi ini.

Lampihong, Februari 2026

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	12
B. Tinjauan Teoritis	14
C. Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Tipe Penelitian	29
D. Data dan Sumber Data.....	30
E. Desain Operasional Variabel	31
F. Teknik pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	34
H. Uji Kredibilitas Data.....	35
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Daftar Informan	31
Tabel 3. 2	Desain Operasional Penelitian	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. I Kerangka Pemikiran	28
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau dan memiliki tingkat penduduk relatif tinggi, hal ini menimbulkan beberapa masalah bagi Indonesia terutama mengenai kemiskinan. Kemiskinan ialah masalah yang dihadapi diberbagai negara tidak hanya di Indonesia saja. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Namun, pada tahun 2025 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan walaupun tidak dengan hasil yang signifikan, tingkat kemiskinan di Indonesia per maret 2025 kembali menurun menjadi 8,25% dari semula 8,47%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan menurun ditengah tekanan harga komoditas dunia, khususnya harga pangan dan energi yang berdampak pada harga-harga domestic dan daya beli masyarakat (BPS Indonesia 2025) .

Program bantuan pangan (Banpang) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar. Program ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, mengurangi beban pengeluaran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Dalam implementasinya, efektivitas program menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya di tingkat desa , tidak jarang ditemukan berbagai

permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas program tersebut. Hal ini juga terjadi di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

Berdasarkan pengamatan awal, terdapat beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa program bantuan pangan belum sepenuhnya optimal. Salah satu fenomena adalah masih adanya ketidaktepat sasaran penerima bantuan, dimana terdapat masyarakat yang seharusnya tidak termasuk kategori miskin tetapi tetap menerima bantuan. Sebaliknya, terdapat pula masyarakat yang layak menerima namun belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang meskipun tidak memenuhi kriteria, tetap menginginkan untuk menerima bantuan, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dilingkungan masyarakat.

Fenomena-fenomena lainnya adalah terkait dengan ketepatan waktu penyaluran bantuan yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga mengurangi manfaat bantuan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Selain itu, kualitas dan jumlah bantuan yang diterima juga menjadi perhatian, karena tidak selalu sesuai dengan harapan atau kebutuhan penerima manfaat. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Program Bantuan Pangan di Desa Kusambi Hulu masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai efektivitas Program Bantuan Pangan (Banpang) untuk mengetahui sejauh mana program ini telah mencapai tujuan yang diharapkan serta factor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program bantuan pangan di Desa Kusambi Hulu.

Ada beberapa kajian mengenai program bantuan pangan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Berdasarkan PERMENSOS Nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial disebutkan bahwa bantuan sosial tersebut adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan resiko sosial. Berdasarkan peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2017 bahwa program keluarga harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang kemudian diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH.

Berdasarkan rapat internal Presiden RI pada tanggal 2 maret 2023 mengenai kebijakan bantuan sosial dalam bentuk beras dan surat Kepala Badan Nasional Nomor: 82/TS.03.03/K/3/2023 tentang penyaluran cadangan pangan pemerintah dalam rangka pemberian bantuan pangan . Tujuan dari bantuan pangan ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan dan sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, stunting, gizi buruk, keadaan darurat, melindungi produsen dan konsumen serta mengendalikan dampak dari inflasi dan fluktuasi harga (Badan Pangan Nasional 2023).

Menyikapi naiknya harga beras saat ini yang sekarang sudah mencapai harga Rp. 14000 sampai 15000/kg, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras bagi masyarakat yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos. Harapannya dengan adanya bantuan tersebut dapat menekan harga beras dan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai. Dimana Menteri Sosial Republik Indonesia menimbang:

1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, negara melaksanakan penanganan fakir miskin dengan melakukan penyaluran bantuan pangan sosial secara non tunai dan akuntabel.
2. Bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri sosial Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sampai saat ini masih dimanfaatkan untuk tiga kebutuhan yaitu saat darurat, kerawanan pangan pasca bencana dan stabilitas harga. Pada saat darurat pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menyalurkan beras CBP demi menjaga ketahanan pangan rumah tangga bagi korban bencana sebanyak 200 ton setahun, sedangkan pemerintah

Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menyalurkan maksimal 100 ton setahun. Jumlah tersebut tidak harus dihabiskan, namun dengan kewenangan tersebut Gubernur. Bupati/Walikota mempunyai stok beras yang cukup untuk membantu korban bencana pada detik pertama.

Pada saat terjadi bencana Gubernur dan Bupati/Walikota dapat langsung memerintahkan BULOG untuk mengeluarkan sejumlah beras di lokasi yang telah ditentukan. Pengalaman selama ini, beras tersebut Sebagian dikirim ke beberapa dapur umum untuk langsung di distribusikan sebagai makanan yang siap makan dan Sebagian dibagikan langsung ke beberapa rumah atau kelompok untuk dipergunakan dilain waktu.

situasi darurat berlalu, umumnya ada nacaman baru yaitu kerawanan pangan pasca bencana karena belum pulihnya perekonomian masyarakat pasca bencana, untuk itu Cadangan Beras Pemerintah (CBP) masih bisa dipergunakan untuk mengatasi rawan pangan pasca bencana tersebut. Tidak jauh berbeda dengan mekanisme pada saat darurat, pada saat sistuasi ini Bupati/Walikota dapat menyampaikan jumlah kebutuhan beras untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga korban bencana kepada Menteri sosial, dengan instruksi tersebut BOLUG menyalurkan beras sejumlah permintaan yang dibutuhkan untuk lokasi yang memerlukan.

Cadangan Beras Pemerintah yang sudah digunakan saat ini adalah sebagai alat intervensi pemerintah pada saat harga drastic mengalami kenaikan, pada saat ini pemerintah mengintervensi pasar dengan menambah suplai ke pasar dengan memperhatikan perkembangan harga beras di pasar, Bupati/Walikota mengajukan permohonan OP (operasi pasar) tingkat provinsi

dan akan diteruskan kepada Menteri perdagangan. Dengan dasar surat permohonan tersebut, Menteri Perdagangan memerintahkan perum BOLUG untuk melaksanakan operasi pasar di lokasi yang telah ditetapkan dan dengan harga yang ditentukan serta pada periode yang dibutuhkan dengan berkoordinasi pada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang memerlukan agar tidak terjadi keresahan masyarakat akibat dari kenaikan harga yang drastis.

Berkaitan dengan penjelasan diatas dan mengenai adanya program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Badan Pangan Nasional pada Keluarga Penerima Manfaat tersebut, maka banyak pemerintah dan wilayah di Indonesia yang mendapatkan program bantuan sosial dalam bentuk beras atau Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut, salah satunya adalah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan lebih khususnya pada Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang juga mendapatkan program bantuan sosial dalam bentuk beras. Tim Pendata harus memastikan bahwa kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia dan penyandang disabilitas tersebut terdata sebagai calon keluarga penerima manfaat (KPM) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) . Total Beras atau pangan yang diterima pada program BPNT berupa CBP ini yaitu 10kg/KPM.

Dari hasil observasi awal penelitian dengan adanya bantuan sosial terutama Program Bantuan Pangan di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Desa Kusambi Hulu memiliki 4 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah 4,96 Km, memiliki jumlah penduduk sebanyak 622 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 212. Dan 12

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) . Dimana melihat dari banyaknya bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin, namun banyak keluhan dari masyarakat Desa Kusambi Hulu “masih tidak terdapat waktu penyaluran bantuan beras masyarakat setiap bulannya yang dikarenakan tidak adanya penjadwalan waktu yang pasti dari pihak terkait, terkadang bisa terjadi satu bulan sekali, dua bulan sekali, bahkan enam bulan sekali. Masih ada masyarakat di Desa Kusambi Hulu yang merupakan golongan miskin yang tidak masuk di dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) padahal DTSEN merupakan basis data untuk penentuan sasaran penerima bantuan sosial yang dipakai oleh Kementerian Sosial seperti Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Badan Pangan Nasional untuk mengatasinya Dinas Sosial Kabupaten Balangan telah berupaya mengusulkan kepada Kementerian Sosial di bidang Badan Pangan Nasional masyarakat miskin yang belum masuk DTSEN untuk dapat dimasukkan DTSEN namun demikian tidak semua masyarakat miskin yang diusulkan akan diterima oleh Kementerian Sosial Badan Pangan Nasional. Berdasarkan dari coordinator Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Adanya ketidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan pangan terlihat dari beras yang didistribusikan ke desa telah dilengkapi dengan daftar penerima manfaat, namun masih terdapat nama-nama yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, bahkan beberapa di antaranya juga tercatat sebagai penerima bantuan sosial lainnya. Kondisi ini

menimbulkan ketidakpuasaan di kalangan Sebagian masyarakat. Di sisi lain, terdapat pula masyarakat yang meskipun tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan tetap menginginkan untuk memperoleh bantuan tersebut. Fenomene ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat, terutama bagi mereka yang sebenarnya lebih layak menerima bantuan.

Sehingga dengan adanya keluhan tersebut secara garis besar penulis dapat menemukan 3 (tiga) fenomena permasalahan terkait dengan Penerima Program Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut pada keluarga penerima manfaat di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong yaitu sebagai berikut :

1. Masih tidak terdapat waktu pelaksanaan penyaluran bantuan beras masyarakat setiap bulannya yang dikarenakan tidak adanya penjadwalan waktu yang pasti dari pihak terkait, terkadang bisa terjadi 1 Bulan Sekali, 2 Bulan Sekali bahkan 6 Bulan Sekali. Ada 12 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong yang menerima Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dimana mereka menunggu pembagian beras tersebut.
2. Masih ada masyarakat di Desa Kusambi Hulu yang merupakan golongan miskin yang tidak masuk di dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) padahal DTSEN merupakan basis data untuk penentuan sasaran penerima bantuan sosial yang dipakai oleh Kementerian Sosial seperti Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Badan Pangan Nasional untuk mengatasinya Dinas Sosial Kabupaten

Balangan telah berupaya mengusulkan kepada Kementerian Sosial di bidang Badan Pangan Nasional masyarakat miskin yang belum masuk DTSEN untuk dapat dimasukkan DTSEN namun demikian tidak semua masyarakat miskin yang diusulkan akan diterima oleh Kementerian Sosial Badan Pangan Nasional. Berdasarkan dari coordinator Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

3. Adanya ketidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan pangan terlihat dari beras yang didistribusikan ke desa telah dilengkapi dengan daftar penerima manfaat, namun masih terdapat nama-nama yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, bahkan beberapa di antaranya juga tercatat sebagai penerima bantuan sosial lainnya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan Sebagian masyarakat. D sisi lain, terdapat pula masyarakat yang meskipun tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan tetap menginginkan untuk memperoleh bantuan tersebut. Fenomene ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat, terutama bagi mereka yang sebenarnya lebih layak menerima bantuan.

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) harus dievaluasi agar program ini berjalan dengan optimal dan indicator keberhasilan dapat dicapai semaksimal mungkin. Dari uraian diatas terkait penyaluran bantuan, maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Desa Kusambi Hulu belum berjalan dengan baik. Mengenai kasus tersebut

dapat disimpulkan bahwa adanya permasalahan dalam proses penyaluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian “ **Efektivitas Program Bantuan Pangan (Banpang) Di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan**”.

B. Fokus Penelitian

Adapun Batasan masalah dalam penelitian yang berjudul “ Efektivitas Program Bantuan Pangan (Banpang) Di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan” maka penulis membuat fokus penelitian agar permasalahan tidak mengembang menggunakan teori menurut Sedarmayanti (2018) pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Pencapaian tujuan
2. Ketepatan Waktu
3. Kualitas hasil (output)
4. Kepuasan penerima manfaat

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Pangan Di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Pangan Di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Program Bantuan Pangan Di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Pangan Di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi dan dapat digunakan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai “ Efektivitas Program Bantuan Pangan (Banpang) Di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan”.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi Pemerintahan Desa Kusambi Hulu dalam upaya meningkatkan mutunya dalam memberikan masukan positif dan manfaat bagi pemerintah khususnya pada bidang program bantuan pangan untuk menjadi bahan masukan pada perbaikan pelaksanaan penyaluran program bantuan pangan

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Arum Sekar, 2023.** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya masalah kemiskinan yang membuat pemerintah harus menanggulangi masalah tersebut untuk membantu mensejahteraan masyarakat yang kurang mampu, salah satunya adalah dengan mengadakan program bantuan pangan non-tunai (BPNT) khususnya di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dengan adanya program BPNT ini yang kemudian dibuat beberapa ketepatan yang menjadi sasaran dalam program BPNT tidak sesuai kriteria yang akhirnya membuat bantuan ini tidak tepat sasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan efektivitas program BPNT terhadap kesejahteraan keluarga miskin di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan Teknik analisis datanya menggunakan kondensasi data (pemilihan, pengerucutan, peringkasan, penyederhanaan, dan transpormasi) . Penyajian data dan penarikan kesimpulan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder yang diperoleh dari Teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa efektivitas program BPNT yang ada di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan kurang efektif karena tidak dilakukan sosialisasi oleh aparat desa maupun penanggung jawab BPNT kepada KPM terkait pemahaman program, maksud dan tujuan program bantuan ini diadakan. Selain itu, ketepatan sasaran juga kurang tepat karena masih terdapat beberapa penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria penerima BPNT. Adapun hal lain yang juga membuat bantuan ini kurang efektif adalah waktu penyaluran bantuannya yang tidak tepat waktu dan membuat para keluarga penerima manfaat (KPM) harus menunggu lebih lama untuk menerima bantuan tersebut.

2. **.Sari, 2021.** Universitas Negeri Makassar. Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sukamaju. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) sebagai salah satu program perlindungan sosial pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat (KPM) . Program BPNT merupakan transformasi dari program bantuan pangan sebelumnya (Rastra) yang diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi penyaluran, serta transparansi melalui sistem non tunai. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara keseluruhan, menyimpulkan bahwa efektivitas program BPNT di Kecamatan Sukamaju berada pada kategori cukup efektif, namun masih memerlukan

berbagai perbaikan agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah melakukan pembaharuan data secara berkala, meningkatkan kualitas bahan pangan. Dengan demikian, diharapkan program BPNT dapat berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti dapat memberikan hasil, ada pengaruh, ada akibat, ada efek, dapat membawa hasil dan nilai guna. Sementara itu efektivitas memiliki pengertian keadaan yang berpengaruh, kemajuan, keberhasilan dan hal mulai berlaku (2003:284) .

Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi (Kumorotomo, 2005:362) .

Menurut S. P Siagian (2002:151) adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu.

Secara umum teori efektivitas berorientasi pada hasil dan tujuan, dimana makin besar tujuan yang tercapai maka makin tinggi pula keefektifan yang dihasilkan.

Efektivitas secara umum adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur berdasarkan kualitas, kualitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Sondang P. Siagian dalam Suchayowati (2017:12) memberikan definisi bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas tersebut menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, apabila hasil kegiatan semakin mendekati sasaran maka dapat dikatakan bahwa efektivitas tersebut makin tinggi.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan menggunakan berbagai indicator berdasarkan konsep dan teori yang ada, ukuran efektivitas akan menjadi tolak ukur dalam melakukan analisis suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung dari siapa yang menilai dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh.

Menurut Sutrisno dalam (Ramadhan, 2018) menjelaskan bahwa ukuran efektivitas program di dalam suatu organisasi meliputi:

- 1) Pemahaman program
- 2) Tepat sasaran
- 3) Tepat waktu
- 4) Tercapainya tujuan
- 5) Perubahan nyata

Menurut Sigit (2003:2) Efektivitas adalah suatu kontinum yang merentang dari efektif, kurang efektif, sedang efektif, sangat kurang efektif sampai dengan tidak efektif. Efektif juga dapat diartikan sejauh mana tujuan (organisasi) yang dapat dicapai untuk sasaran yang ingin dicapai dalam organisasi.

Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Sesuatu organisasi barang kali bisa dikatakan efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi, semakin dekat organisasi dengan tujuan, maka dapat dikatakan semakin efektif suatu organisasi tersebut (Ahadi,2010:3) .

Menurut pendapat (Edy Sutrisno, 2010:125) ada tujuh variable yang mempengaruhi organisasi terhadap efektivitas yaitu:

- 1) Struktur
- 2) Teknologi yaitu perbuatan, pengetahuan, teknis dan peralatan fisik yang digunakan untuk mengubah input menjadi output, barang dan jasa
- 3) Lingkungan eksternal
- 4) Lingkungan Internal
- 5) Keterkaitan karyawan pada organisasi
- 6) Prestasi karyawan
- 7) Kebijakan manajemen

Menurut Beni (2016) Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan atau dapat dikatakan sebagai ukuran seberapa jauh tingkah output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi tersebut. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sector public, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan layanan masyarakat yang merupakan sasaran yang sudah ditentukan.

Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi. Kegiatan ataupun program dan disebut efektif apabila tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya pada suatu usaha atau kegiatan tersebut. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu

instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut adalah keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi dari instansi tersebut

b. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Efektivitas merupakan sebagai suatu keberhasilan dalam melakukan program yang dipengaruhi oleh berbagai factor-faktor yang dapat menentukan efektivitas organisasi berhasil dilakukan dengan baik atau tidak.

Berikut ini, dikemukakan factor-faktor yang mempengaruhi keefektifan organisasi dari muhyadi (dalam Syumsu Q. Badu dan Novianty Djafri, 2017, p. 133-135):

1) Karakteristik Organisasi.

Karakteristik organisasi berkaitan erat dengan struktur dan teknologi yang ditetapkan, tingkat kompleksitas dan formalitas struktur serta system kewenangan dalam pengambilan keputusan (sentralisasi dan desentralisasi) berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Struktur yang mendukung tercapainya tingkat efektivitas yang tinggi bergantung pada jenis organisasi serta tujuan yang akan dicapai.

2) Karakteristik Lingkungan

Organisasi tidak berjalan sendirian melainkan Bersama beberapa organisasi lain dalam lingkungan yang lebih luas. Dengan kata lain, interaksi antara organisasi dengan lingkungan merupakan sesuatu yang lazim sehingga keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh kemampuan interaksi dengan lingkungan.

3) Karakteristik Pekerja

Faktor manusia (anggota organisasi) merupakan factor yang berpengaruh besar terhadap efektivitas, perilaku anggota dapat dikatakan sebagai dukungan yang paling berarti bagi pencapaian keefektifan organisasi. Namun disitu sisi hal ini dapat dikatakan sebagai hambatan yang sanggup mengurangi bahkan menggagalkan keefektifan. Satu hal yang selalu terdapat pada setiap organisasi ialah bahwa masing-masing anggota memiliki karakteristik dari satu anggota kepada anggota lain sehingga mempengaruhi perilaku.

- 4) Kebijakan yang diambil seorang manajer dalam mengelola organisasi memiliki dampak langsung terhadap keefektifan organisasi. Hal ini meliputi proses dan mekanisme kerja yang berlangsung dalam sebuah organisasi. Pada intinya, aspek-aspek yang berkaitan dengan kebijakan manajer mencakup penentuan tujuan yang strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien untuk menciptakan lingkungan yang merangsang anggota untuk berprestasi, proses komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut kemampuan organisasi dalam merespon lingkungan.

c. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, siapa yang menilai dan menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi harus memberikan pemahaman efektivitas terhadap kualitas dan kuantitas (output) suatu barang dan jasa.

Tingkat efektivitas tersebut juga dapat diukur dengan membandingkan hasil nyata yang telah diwujudkan dari kegiatan atau usaha tersebut, namun jika hasil kegiatan atau usaha yang dilakukan tidak tepat maka akan menyebabkan tujuan atau sasaran yang diharapkan tidak tercapai, sehingga hal ini dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut Steers (Sutrisno, 2018, p. 106) bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau kegiatan perlu diperhatikan beberapa kriteria, yaitu:

- 1) Produksi
- 2) Efisiensi
- 3) Kepuasan
- 4) Adaptasi
- 5) Perkembangan

Menurut Sedarmayanti (2018) bahwa pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol, yaitu:

- 1) Pencapaian tujuan
- 2) Ketepatan waktu
- 3) Kualitas hasil (output)
- 4) Kepuasan penerima manfaat

Menurut Budiani (Sari, 2021, p. 15) menyatakan bahwa untuk mengukur efektifitas suatu program dapat dilakukan dengan variable-variabel sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi program
- 2) Tujuan Program
- 3) Pemantaun program

Menurut Sutrisno (Amrizal, 2018, p. 43) bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan perlu diperhatikan beberapa sub variable, yaitu:

- 1) Pemahaman program
- 2) Tepat sasaran
- 3) Tepat waktu
- 4) Tercapainya tujuan
- 5) Perubahan nyata

Dari beberapa teori diatas dilihat dari observasi awal dilapangan, maka aspek yang paling sesuai dengan mengukur efektivitas yaitu menurut Sedarmayanti (2018) yaitu:

- 1) Pencapaian tujuan adalah indicator utama dalam mengukur efektivitas suatu program. Indikator ini menilai sejauh mana

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan. Tujuan program biasanya telah dirumuskan secara jelas dalam perencanaan, baik dalam bentuk tujuan umum maupun tujuan khusus. Pencapaian tujuan tidak hanya dilihat dari terlaksananya program, tetapi juga dari kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa suatu program dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan dampak yang sesuai dengan harapan awal.

- 2) Ketepatan waktu adalah indicator yang menunjukkan apakah suatu program dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Waktu menjadi indicator penting karena keterlambatan dalam pelaksanaan program dapat mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat.
- 3) Kualitas hasil (output) adalah indicator yang menilai mutu dari hasil yang dicapai oleh suatu program. Tidak cukup hanya mencapai tujuan, tetapi hasil yang diberikan juga harus memenuhi standar kualitas tertentu agar benar-benar bermanfaat. Bahwa kualitas output berkaitan dengan kesesuaian hasil dengan kebutuhan penerima serta standar yang telah ditetapkan. Output yang berkualitas akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap keberhasilan program.
- 4) Kepuasan penerima manfaat adalah indicator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan dan penilaian masyarakat

terhadap program yang dilaksanakan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana program mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Kepuasan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan suatu program.

2. Bantuan Sosial Pada Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

a. Pengertian Bantuan Sosial

Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, maka pemerintah Indonesia telah membuat suatu kebijakan pemberian Bantuan Sosial (BANSOS) bagi penduduk Indonesia. Pengertian bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang bersifat tidak secara terus-menerus dan selektif, bantuan tersebut bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sedangkan pengertian bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara atau Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan atau kesejahteraan masyarakat.

Program bantuan sosial untuk rakyat Indonesia terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan

Bantuan Sosial Rastra atau Bantuan Non-Tunai Program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang bersifat tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengertian lain disebutkan bahwa bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial.

Pengelolaan bantuan sosial ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Aturan ini mencabut Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pemberi bantuan sosial adalah satuan kerja pada kementerian atau Lembaga pada pemerintah pusat dan atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintahan daerah, pemberi bantuan sosial tersebut bertugas untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi

perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial dan pelayanan dasar.

b. Pengertian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Bantuan pangan Non-Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat atau keluarga penerima manfaat (KPM) . Adapun tujuan utama dari BPNT tersebut adalah untuk mengatasi atau menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

BPNT adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu setiap bulannya. Pada dasarnya, BPNT adalah bantuan sosial yang berfokus pada penyaluran dukungan sembako sebagai bahan pangan pokok masyarakat.

c. Manfaat Yang Diperoleh Dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

- 1) Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- 3) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan.

d. Syarat Penerima Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT)

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan NIK KTP.

- 2) Sudah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) .
- 3) Tidak Menerima gaji minimal UMR sebagai penerima aktif atau pensiunan.
- 4) Tidak menjadi pedamping sosial diprogram-program tertentu.
- 5) Berasal dari keluarga tidak mampu, tercatat dalam desil terbawah data kemiskinan dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Kartu Keluarga (KK) yang valid dan terdaftar di dukcapil.

Melalui upaya dan syarat yang dilakukan pemerintah berharap dapat memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) .

3. Cadangan Beras Pemerintah

a. Pengertian

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah persediaan beras yang diatur dan dikelola oleh Pemerintah pada Perum BULOG, dengan arahan penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana.

Badan Pangan Nasional yang dipimpin oleh Arief Prasetyo Adi, mengumumkan bahwa alokasi bantuan sosial berupa beras dengan mencapai Rp 8 Triliun sebanyak 21,35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan ini, dimana setiap

Keluarga Penerima Manfaat Di Desa Kusambi Hulu akan mendapatkan 10 kg beras setiap bulan.

Berdasarkan Pasal 15 UU No 11 Tahun 2009 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Bantuan sosial tersebut bertujuan agar seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- 2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan atau berkelanjutan dalam bentuk
 - a) Bantuan sosial
 - b) Penyediaan aksesibilitas
 - c) Penguasaan kelembagaan

Jadi program bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Badan Pangan Nasional diberikan agar dapat membantu masyarakat miskin sehingga mereka dapat menjaga kelangsungan hidup.

b. Kriteria Calon Penerima Bantuan CBP

Calon penerima CBP adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial maupun yang tidak terdata yang memenuhi kriteria sebagai berikut

- 1) Masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH yang lebih khusus yang memiliki kartu merah putih

- 2) Masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan)
- 3) Masyarakat yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau penyakit kronis

Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Beras Pemerintah

C. Kerangka Pemikiran

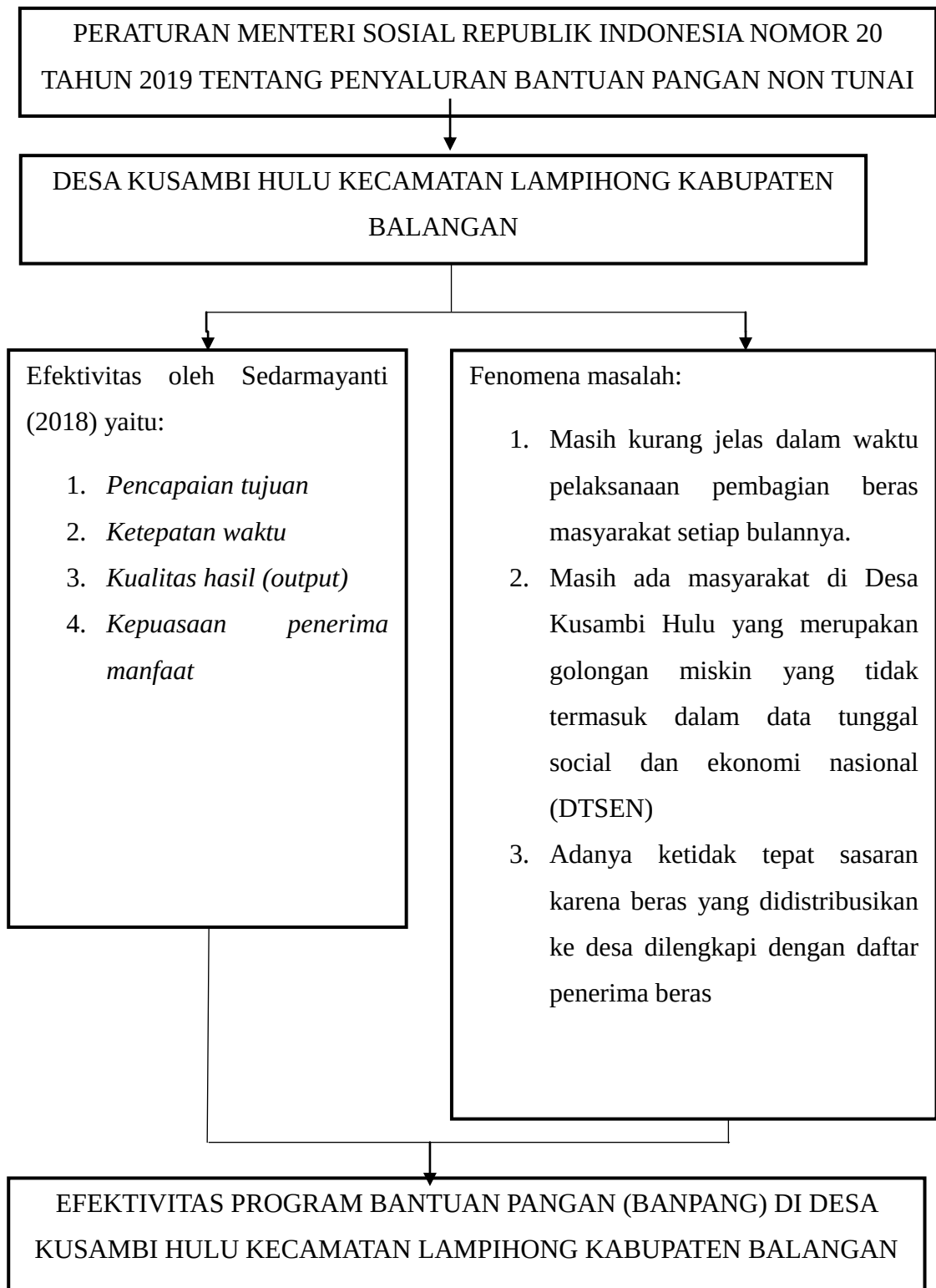
Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan beberapa aspek efektivitas dengan menggunakan teori Sadermayanti (2018) yang mengungkapkan bahwa pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah.

1. Pencapaian tujuan adalah indikator utama dalam mengukur efektivitas suatu program. Indikator ini menilai sejauh mana tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan. Tujuan program biasanya telah dirumuskan secara jelas dalam perencanaan, baik dalam bentuk tujuan umum maupun tujuan khusus. Pencapaian tujuan tidak hanya dilihat dari terlaksananya program, tetapi juga dari kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target yang telah

ditetapkan. Hal ini berarti bahwa suatu program dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan dampak yang sesuai dengan harapan awal.

2. Ketepatan waktu adalah indicator yang menunjukkan apakah suatu program dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Waktu menjadi indicator penting karena keterlambatan dalam pelaksanaan program dapat mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat.
3. Kualitas hasil (output) adalah indicator yang menilai mutu dari hasil yang dicapai oleh suatu program. Tidak cukup hanya mencapai tujuan, tetapi hasil yang diberikan juga harus memenuhi standar kualitas tertentu agar benar-benar bermanfaat. Bahwa kualitas output berkaitan dengan kesesuaian hasil dengan kebutuhan penerima serta standar yang telah ditetapkan. Output yang berkualitas akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap keberhasilan program.
4. Kepuasan penerima manfaat adalah indicator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan dan penilaian masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana program mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Kepuasan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan suatu program.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong kabupaten Balangan Kalimantan Selatan Kode Pos 71661.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini menggunakan kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan, menganalisis fenomena, aktivitas social, sikap, pemikiran secara individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan melakukan pengamatan yang seksama dan mendeskripsikan dalam konteks yang mendetail yang disertai catatan hasil wawancara yang mendalam dan hasil analisi dokumen.

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif yaitu pengambilan data yang dapat dilakukan melalui observasi, wawancara maupun data dokumen. Pengambilan data yang dilakukan melalui wawancara dapat dilakukan secara media telepon, Video conference , maupun tatap muka secara langsung.

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana efektivitas bantuan pangan non tunai berbasis cadangan beras pemerintah pada kelompok penerima manfaat di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informasi yang diteliti.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data Primer adalah Data yang dapat diperoleh dari sumber asli atau pertama. Data Primer juga dapat diartikan sebagai data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memerlukan data tersebut. Adapun data primer yang penulis ambil adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait yang kemudian digali dari informan penelitian tersebut tentang efektivitas program bantuan pangan non-tunai berupa cadangan beras pemerintah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang digunakan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Adapun Data-Data sekunder yang penulis kumpulkan disini di antaranya adalah bersumber dari buku-buku, internet dan data-data yang diperoleh dari Kantor Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh, sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Teknik dalam penarikan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *sampling purposive*. Sugiyono (2016,96) mengatakan bahwa *sampling purposive* adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.

Dalam hal ini penulis menyebutkan sebagai informan kunci atau sumber data yang diperoleh melalui observasi langsung dilapangan dan wawancara tersebut bersumber dari.

Tabel 3.1

Sumber Data Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa Kusambi Hulu	1 orang
2	Koordinator Bantuan Pangan Non Tunai Desa Kusambi Hulu	1 orang
3	Aparat Desa Kusambi Hulu	1 orang
4	Sekretaris Desa Kusambi Hulu	1 orang
5	Keluarga Penerima Manfaat Rt 01	1 orang
6	Keluarga Penerima Manfaat Rt 02	6 orang
7	Keluarga Penerima Manfaat Rt 03	5 orang

E. Desain Operasional Variabel

Desain operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variable atau informasi ilmiah yang akan membantu peneliti lain yang menggunakan variable yang sama. Adapun yang menjadi indicator atau pertanyaan yang diajukan kepada para informan dalam

efektivitas program bantuan pangan di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Sebagai Berikut

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub-Variabel	Indikator
Efektivitas oleh Sedarmayanti (2018)	<i>a. Pencapaian Tujuan</i>	1. Hasil program sesuai dengan perencanaan 2. Bantuan yang diberikan sesuai dengan tujuan program
	<i>b. Ketepatan Waktu</i>	1. Ketepatan waktu penyaluran bantuan 2. Tidak adanya keterlambatan yang signifikan
	<i>c. Kualitas Hasil (output)</i>	1. Hasil yang dicapai oleh suatu program 2. Kualitas bantuan yang diterima sesuai ketentuan
	<i>d. Kepuasan Penerima Manfaat</i>	1. Tingkat penerimaan dan kepuasan masyarakat terhadap program

F. Teknik pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2016:224) teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah memperoleh data, tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dan gagasan yang ada sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan atau melanjutkan suatu penelitian.

Nasution (dalam Sugiyono, 2017:226) menyatakan bahwa “observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi”.

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah percakapan anatar dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

Esterberg (dalam Sugiyono, 2017:231) mendefinisikan interview sebagai berikut “wawancara adalah penemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.

Sugiyono (2017:240), “mengemukakan pendapat mengenai dokumen, dokumen merupakan catatan yang sudah berlaku. Dokumen bisa dibentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah bagian yang paling penting dalam suatu penelitian. Melalui teknik analisis data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara deskriptif, data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang efektivitas program bantuan pangan di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

Hasil penelitian yang dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data lapangan secara berkesinambungan Sugiyono (2012:50) . Proses analisis data dari hasil observasi peneliti melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Pengumpulan data-data dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi yang kemudian dilakukan klasifikasi atau pengelompokan data.
2. Data yang sudah diklasifikasi tersebut kemudian diklasifikasikan Kembali sesuai dengan berbagai kategori penelitian kedalam table dan diperiksa secara teliti keabsahan data tersebut.

3. Data yang sudah diproses, dianalisis dan berupaya memberikan jalan pemecahnya serta berusaha untuk menarik suatu kesimpulan secara tuntas dan menyeluruh.

H. Uji Kredibilitas Data

Dalam pengujian kredibilitas data tersebut ada bermacam-macam cara pengujian. Menurut Sugiyono (2017:270) mengaskan bahwa “uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan dengan teman sejawat analisis kasus negative dan member chek” .

1. Perpanjangan Pengamatan

Dalam penelitian ini melakukan perpanjangan pengamatan berarti penelitian Kembali kelapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan sumber data yang sudah pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak mendalam dan mungkin masih banyak yang disembunyikan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek Kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak, apabila data yang diperoleh selama ini setelah dicek Kembali pada sumber data aslu

ternyata tidak benar, maka peneliti akan melakukan pengamatan yang lebih luas dan mendalam lagi, sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

2. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa yang didapatkan dari informasi akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan waktu, dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berfungsi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berfungsi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari saat narasumber

masih segar belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, didalam penelitian ini peneliti akan menggunakan bahan referensi seperti foto-foto dan dokumen-dokumen.

5. Membercheck

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, Adapun tujuan dari membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data berarti data tersebut valid. Sehingga semakin kredibel atau dipercaya. Membercheck ini akan dilakukan dengan Bapak Kepala Desa Kusambi Hulu, Koordinator Bantuan Pangan Non Tunai, Aparat Desa, Sekretaris Desa dan beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) agar hasil penelitian mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. 2022. Tim Penyusunan dan Penulisan Buku Pedoman Skripsi. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai (STIA).
- Bormasa, F. 2022. Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Diana, S. 2020. Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Universitas Wijaya Putra.
- Fathoni, A. 2014. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Gunawan, I. 2015. Metode penelitian kualitatif teori dan praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hanum, S. 2019 Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Medan Johor. Universitas Sumatera Utara.
- Hardani, dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmi.
- Maharani Puan. 2019. Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai. Jakarta: Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Mutiarin, D. dan A.Z. 2014. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penulusuran Konsep dan Teori. Yogyakarta: Instansi.
- Pasolong, H. 2019. Teori Administrasi publik. Bandung: Alfabeta, cv.
- Pasolong, H. 2020. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Keuangan RI. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No 228/pmk.05/2016 tentang perubahan atas PMK No.254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Sosial RI. 2019. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai
- Peraturan Menteri Sosial RI. 2019. Peraturan Menteri Sosial Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial.
- Sugiyono. 2017. Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. 2017. Manajemen sumber daya manusia. Makasar: Kencana.
- Milasari D, A.S. 2020. PROGRAM BANTUAN SOSIAL, DAN AKUNTABILITASNYA. Available at: <https://djpbb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/datapublikasi/artikel/3080->

program-bantuan-sosialdan-akuntabilitasnya.html. Diakses tanggal 15 Februari 2026.

Muanley, Y. 2016. Definisi efektivitas dalam teori manajemen pendidikan. Available at: <https://id.scribd.com/document/408717826/Definisi-Efektivitas-Dalam-Teori-ManajemenPendidikan>. Diakses tanggal 14 Februari 2026